

James Marape Kembali Dilantik Sebagai PM Papua Nugini

PORT MORESBY (IM)

- James Marape resmi dilantik sebagai perdana menteri Papua Nugini (PNG) dalam masa jabatan dua periodenya, Selasa (9/8). Ia berhasil memenangkan 36 kursi di parlemen untuk memenuhi syarat sebagai perdana menteri.

Ia memimpin Partai Pangu dan berjanji untuk mereformasi proses pemilihan. Dalam pidato di parlemen ia juga berjanji mendapatkan lebih banyak dari sumber daya tanpa menakut-nakuti investor. Pada Selasa (9/8), batas waktu parlemen untuk duduk, 105 dari 118 kursi telah diumumkan. Dua wanita termasuk di antara mereka yang terpilih.

Marape, pemimpin Partai Pangu yang meraih 36 kursi terpilih tanpa lawan di parlemen untuk menjadi perdana menteri. Ia nantinya akan membentuk pemerintahan koalisi dengan besaran partai kecil dan independen.

Marape mengatakan koalisi memiliki mandat kolektif dan menyerukan bangsa untuk bersatu. Dalam pidatonya di parlemen, Marape mengatakan pemerintahannya akan memperbarui daftar pemilih dan mungkin memperkenalkan pemungutan suara elektronik untuk memperkuat proses demokrasi dan memastikan satu warga mendapat satu suara.

Dia juga bakal membuat langkah untuk mengembalikan pendapatan yang lebih besar dari sektor pertambangan dan sumber daya ke perekonomian. "Kami pergi ke pemilihan untuk berjuang untuk mendapatkan lebih banyak dari sumber daya alam kami," katanya. "Generasi saya, tipe orang saya berasal dari tempat-tempat di mana sumber daya berlimpah namun pembangunan hampir nihil," imbuhnya menunjuk pada pendidikan dan kesempatan kerja yang langka.

PNG memiliki minyak, gas, emas, ikan, dan kayu. Marape ingin perusahaan dan pemegang lisensi bekerja dengan "rezim baru" miliknya. "Margin keuntungan Anda akan dipertahankan tetapi Papua Nugini juga harus mendapatkan sedikit lebih banyak," katanya dalam komentar yang ditujukan kepada perusahaan sumber daya. Dia juga menandai lebih banyak pengolahan ikan, kayu, emas dan logam lokal untuk mendukung perekonomian.

Pemungutan suara dalam pemilihan umum PNG diadakan setiap lima tahun dan berlangsung selama tiga pekan pada Juli. Namun penghitungan kali ini diperpanjang hingga Senin (8/8) karena keadaan khusus termasuk masalah keamanan, serangan terhadap kotak suara dan tantangan logistik. ● gul



IDN/ANTARA

PENGHEMATAN ENERGI AKIBAT INVASI RUSIA KE UKRAINA

Katedral Cologne terang benderang sebelum lampunya dimatikan pada jam 11 malam untuk menghemat energi akibat invasi Rusia ke Ukraina, di Cologne, Jerman, Selasa (9/8).

PBB Temukan Banyak Bukti Kejahatan Kemanusiaan di Myanmar

Kejahatan kemanusiaan di Myanmar kian ditemukan sejak kudeta militer tahun lalu.

JENEWA (IM) - Penyelidik PBB pada Selasa (9/8) melaporkan semakin banyak bukti kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. Kejahatan tersebut, termasuk pembunuhan, penyiksaan dan kekerasan seksual yang dilakukan di Myanmar sejak kudeta militer tahun lalu.

Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar (IIMM) mengatakan perempuan dan anak-anak secara khusus menjadi sasaran. "Ada banyak indikasi bahwa sejak pengambilalihan militer pada Februari 2021, kejahatan telah dilakukan di Myanmar dalam skala dan dengan cara yang merupakan serangan luas serta sistematis terhadap penduduk sipil," kata para penyelidik dalam sebuah pernyataan, dilansir dari laman Arab News, Rabu (10/8).

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari tahun lalu, menggulingkan pemerintah sipil dan menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

Laporan PBB itu men-

gatakan bahwa menurut bukti yang dikumpulkan, "Kejahatan seksual dan berbasis gender, termasuk pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, dan kejahatan terhadap anak-anak telah dilakukan oleh anggota pasukan keamanan dan kelompok bersenjata."

Koumjian mengatakan, para penyelidik secara khusus berfokus pada kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak, yang merupakan di antara kejahatan internasional paling parah, tetapi mereka juga secara historis kurang dilaporkan dan kurang diselidiki.

Anak-anak di Myanmar telah dibunuh, disiksa dan ditahan secara sewenang-wenang, termasuk wakil orang tua mereka, menurut laporan tersebut. Mereka juga menjadi sasaran kekerasan seksual dan wajib militer serta dilatih oleh pasukan keamanan dan kelompok bersenjata.

Tim yang tidak pernah diizinkan untuk mengunjungi Myanmar, mengatakan bahwa mereka sekarang telah mengumpulkan hampir tiga juta "item informasi", termasuk pernyataan wawancara, dokumen, foto, dan citra geospasial.

Para penyelidik mengatakan bukti yang mereka kumpulkan menunjukkan bahwa beberapa konflik bersenjata sedang berlangsung dan meningkat di wilayah Myanmar.

Mereka mengatakan bahwa mereka sedang menyusun berkas kasus tentang insiden spesifik kejahatan perang yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata tersebut, termasuk serangan yang disengaja yang ditujukan pada warga sipil, pembunuhan tanpa pandang bulu dan pembakaran desa serta kota yang meluas.

Pakar PBB lainnya dan IIMM sendiri telah memperkirakan bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sedang dilakukan. Tetapi pada Selasa ini, para penyelidik memperingatkan bahwa semakin banyak wilayah yang dilanda kekerasan, dan sifat potensi kriminalitas juga berkembang.

Mereka menunjuk eksekusi junta terhadap empat tahanan mereka sekarang telah mengumpulkan hampir tiga juta "item informasi", termasuk pernyataan wawancara, dokumen, foto, dan citra geospasial.

yang sedang berlangsung dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, lima tahun setelah penumpasan berdarah 2017 yang mengakibatkan perpindahan hampir satu juta orang.

Sebagian besar dari sekitar 850 ribu orang Rohingya yang diusir ke kamp-kamp di negara tetangga Bangladesh masih ada di sana, sementara 600 ribu lainnya berada di negara bagian Rakhine Myanmar.

"Sementara Rohingya secara konsisten mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali dengan aman dan bermartabat ke Myanmar, ini akan sangat sulit dicapai kecuali ada pertanggungjawaban atas kekejaman yang dilakukan terhadap mereka, termasuk melalui penuntutan terhadap individu yang paling bertanggung jawab atas kejahatan tersebut," kata Koumjian.

Bulan lalu, Mahkamah Internasional di Den Haag menolakan keberatan dari penguasa militer Myanmar dan memutuskan untuk mendengarkan kasus penting yang menuduh negara itu melakukan genosida terhadap Rohingya. ● tom

Presiden Ukraina Desak Barat Larang Semua Pelancong Asal Rusia

UKRAINA (IM) - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta negara-negara Barat untuk melarang semua pengunjung atau wisatawan asal Rusia. "Orang Rusia harus hidup di dunia mereka sendiri sampai mereka mengubah filosofi mereka," kata Zelensky kepada The Washington Post.

Menurut dia, larangan seperti itu akan lebih efektif daripada sanksi saat ini, yang melarang maskapai dan pejabat Rusia terkait dengan Kremlin. Diketahui, Rusia masih bisa mendapatkan visa Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS).

Seruan Zelensky mungkin hanya mendapat dukungan terbatas, karena Rusia - meskipun ada sanksi - memiliki hubungan bisnis global yang luas dan turis Rusia masih diterima di tujuan liburan seperti Mesir, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Perdana Menteri (PM) Estonia Kaja Kallas mendukung seruan ini. "Berhenti mengeluarkan visa turis ke Rusia. Mengunjungi Eropa adalah hak istimewa, bukan hak asasi manusia," cuitnya pada Selasa (9/8).

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkevics mengatakan kepada situs web Politico bahwa negara-negara Uni Eropa harus membatasi penerbitan visa untuk Rusia, dengan pengecualian untuk alasan kemanusiaan. Pada Senin (8/8), tetangga Nordik mereka, Finlandia, juga mendukung pembatasan pengunjung Rusia.

PM Finlandia Sanna Marin mengatakan kepada penyiar nasional YLE "tidak benar bahwa pada saat yang sama ketika Rusia melancarkan perang agresif dan brutal di Eropa, Rusia dapat menjalani kehidupan normal, bepergian di Eropa, menjadi turis".

Estonia dan Finlandia diperkirakan akan mengangkat masalah visa pada pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa segera. Terkait hal ini, Kremlin menanggapi

dengan cemoohan.

Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, mengutuk usulan Zelensky, dengan mengatakan "ini hanya dapat dilihat secara sangat negatif". Seperti diketahui, visa Schengen UE memungkinkan pengunjung untuk tinggal di UE hingga 90 hari untuk pariwisata atau bisnis.

Pengunjung dapat melakukan perjalanan dengan bebas di dalam zona Schengen 26 negara pada periode itu - zona yang mencakup 22 negara Uni Eropa ditambah Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein.

Jadi orang Rusia masih dapat mengunjungi sebagian besar negara UE meskipun tidak ada hubungan udara langsung. Namun, mereka yang berada dalam daftar sanksi Barat - banyak oligarki dan pejabat yang terkait dengan Presiden Putin dan militer Rusia - dilarang.

Invasi Rusia 24 Februari lalu ke Ukraina memicu sanksi Barat yang luas dan mendorong puluhan ribu orang Rusia untuk pergi ke luar negeri. Mereka termasuk aktivis oposisi, tetapi juga banyak yang tidak terlibat secara politik dan melihat peluang yang lebih baik di luar Rusia.

Zelensky mengatakan "sanksi yang paling penting adalah menutup perbatasan - karena Rusia mengambil tanah orang lain". Dia sebelumnya mengutuk kegagalan Barat untuk melarang semua impor gas dan minyak Rusia - perdagangan yang membantu mendorong kampanye Putin di Ukraina.

Invasi Rusia telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan orang Ukraina melarikan diri ke luar negeri, sebagian besar ke Polandia dan negara-negara Uni Eropa terdekat lainnya.

Kemarahan Ukraina pada agresif Rusia telah diekspresikan sebagai reaksi terhadap bahasa dan budaya Rusia. ● gul

Mantan Presiden Sri Lanka Dikabarkan Mengungsi ke Thailand

KOLOMBO (IM) - Mantan Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, diperkirakan akan terbang ke Thailand pada Kamis (11/8) setelah menetap hampir satu bulan di Singapura.

Rajapaksa mencari perlindungan sementara di negara Asia Tenggara, setelah melarikan diri dari Sri Lanka bulan lalu. Dia melarikan diri setelah ribuan pengunjung rasa menggeruduk kedatangan resminya dan menuntunnya untuk mundur, karena tidak becus menangani krisis ekonomi.

Pada 14 Juli, melalui Maladewa, Singapura telah memperpanjang izin tinggal Rajapaksa selama 14 hari tambahan. Dua sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters, izin kunjungan jangka pendek yang dikeluarkan ketika Rajapaksa tiba dalam kunjungan pribadi ke Singapura telah diperpanjang.

Dengan perpanjangan izin tersebut, maka Rajapaksa dapat tinggal di Singapura hingga 11 Agustus. Pada saat Rajapaksa

melarikan diri, pemerintah Singapura mengatakan, Rajapaksa belum diberikan suaka, dan berada di negara itu untuk kunjungan pribadi.

"Saya yakin dia pada akhirnya akan mempertimbangkan untuk kembali ke Sri Lanka, tetapi tidak ada sikap politik atau sikap lain yang pasti mengenai hal ini," kata juru bicara pemerintah Sri Lanka Bandula Gunwardena.

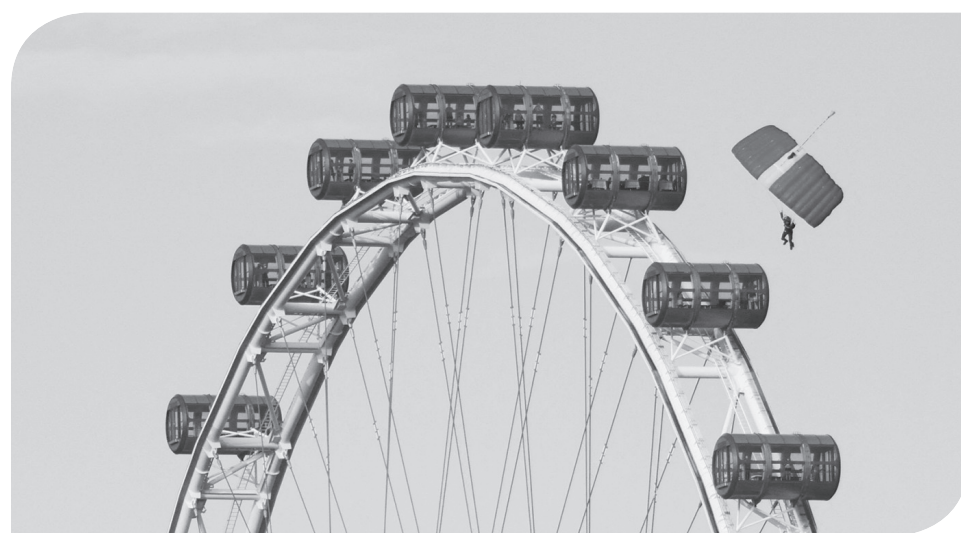
Rajapaksa mengajukan surat pengunduran diri kepada ketua parlemen. Tak lama berselang, parlemen menggelar pemilihan presiden. Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe kemudian terpilih menjadi presiden menggantikan Rajapaksa.

Wickremesinghe mengatakan, belum saatnya Rajapaksa kembali ke Sri Lanka. Karena kehadiran Rajapaksa dapat mengobarkan ketegangan politik.

"Saya tidak yakin ini saanya dia kembali. Saya tidak punya indikasi dia akan segera kembali," kata Wickremesinghe dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal.

Sri Lanka telah melakukan pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang paket bailout. Pada April, Sri Lanka telah menanggung pembayaran utang luar negeri sekitar 12 miliar dolar AS. Sri Lanka memiliki utang yang harus dibayar senilai hampir 21 miliar dolar AS, yang akan jatuh tempo pada akhir 2025.

Wickremesinghe mengharapkan kesepakatan tingkat staf IMF akan tercapai pada akhir Agustus. Dia menambahkan bahwa, Sri Lanka harus mengamankan lebih dari 3 miliar dolar AS dari sumber lain tahun depan untuk mendukung impor penting termasuk bahan bakar, makanan dan pupuk. Wickremesinghe juga mengatakan, Sri Lanka akan melihat peningkatan yang nyata dalam keadaan ekonomi mereka. ● ans



IDN/ANTARA

HARI KEMERDEKAAN SINGAPURA

Anggota tim parasut Angkatan Bersenjata Singapura Red Lions unjuk kebolehan di atas Marina Bay pada peringatan Hari Kemerdekaan di Singapura, Selasa (9/8). Singapura merdeka dari Malaysia pada 9 Agustus 1965.

Rusia Rekrut Napi Pembunuhan untuk Perang

MOSCOW (IM) - Ada semakin banyak bukti bahwa Kremlin merekrut narapidana Rusia untuk berperang di Ukraina. Selama sebulan penyelidikan, CNN telah berbicara dengan narapidana yang terjebak dalam skema perekrutan terbaru Rusia.

Dari sel penjaranya yang sempit, seorang narapidana pelanggan narkoba berbicara dengan syarat anonim menggunakan smartphone selundupan untuk menguraikan kondisi yang ditawarkan perekrut. "Mereka akan menerima pembunuhan, tetapi bukan pemerkosaan, pedofili, ekstremitas, atau teroris," katanya.

Amnesti atau pengampunan dalam enam bulan ditawarkan kepada mereka. "Seseorang berbicara tentang 100.000 rubel (sekitar Rp 24,5 juta) sebulan, 200.000 rubel (sekitar Rp 49 juta) lagi. Semuanya berbeda," tambahnya.

Dia mengatakan tawaran itu dibuat ketika orang-orang tak dikenal, yang diyakini sebagai bagian dari perusahaan kontraktor militer swasta, datang ke penjara pada paruh pertama Juli.

Penerimaan ke dalam program itu akan mengarah pada pelatihan dua minggu di wilayah Rostov di Rusia selatan. Para perekrut tampaknya tidak mempertimbangkan pengalaman militer untuk merekrut narapidana, jelasnya.

"Dalam kasus saya, jika itu nyata, maka saya mendukungnya," kata narapidana itu. "Itu bisa membuat perbedaan nyata bagi saya: dipenjarakan selama hampir satu dekade, atau keluar dalam enam bulan jika Anda beruntung. Tapi itu jika Anda beruntung. Saya hanya ingin pulang ke rumah anak-

anak sesegera mungkin. Jika opsi ini memungkinkan, mengapa tidak?" Narapidana itu mengatakan 50 tahanan telah dipilih untuk perekrutan dan ditempatkan di karantina di penjara, tetapi dia mendengar ada 400 orang yang melamar.

Sementara itu, aktivis hak asasi yang bekerja di sistem penjara Rusia mengatakan sejak awal Juli mereka telah dibanjiri laporan dari seluruh Rusia dari kerabat yang cemas, prihatin dengan nasib kerabat mereka di penjara.

"Dalam tiga minggu terakhir (di bulan Juli), ada gelombang yang sangat besar dari proyek ini untuk merekrut ribuan tahanan Rusia dan mengirim mereka ke perang," kata Vladimir Osechkin, kepala Gulag.net, sebuah kelompok advokasi tahanan.

Osechkin mengatakan beberapa dijanjikan pembayaran kepada keluarga mereka sebesar lima juta rubel (sekitar Rp 1,2 miliar) jika mereka meninggal, tetapi semua imbalan finansial mungkin tidak akan pernah dibenarkan.

Beberapa narapidana dan anggota keluarga mereka tampak tertarik agar perekrutan dilanjutkan, kata Osechkin. Dia berspekulasi bahwa para narapidana digunakan secara efektif sebagai umpan, untuk menarik api posisi Ukraina dan memungkitkan militer reguler Rusia untuk menyerang balik secara akurat.

"Mereka pergi duluan, dan ketika tentara Ukraina melihat mereka, dan mereka menyerang. Kemudian tentara Rusia melihat di mana Ukraina berada, dan mengobom tempat itu," katanya. ● ans



IDN/ANTARA

MLS SOCCER CELEBRATION DI AS

Sejumlah penggemar berpartisipasi dalam acara MLS Soccer Celebration di luar Allianz Field sebelum dimulainya MLS All Stars Skill Challenge 2022 di Saint Paul, Minnesota, Amerika Serikat, Selasa (9/8).

Presiden AS Teken Dokumen Dukung Swedia dan Finlandia Bergabung dengan NATO

WASHINGTON (IM) - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Selasa (9/8) menandatangani dokumen yang mendukung akses Finlandia dan Swedia ke NATO, ekspansi paling signifikan dari aliansi militer sejak 1990-an saat negara itu menanggapi invasi Rusia ke Ukraina.

Biden menandatangani "instrumen ratifikasi" AS untuk menyambut kedua negara, langkah terakhir untuk pengesahan mereka oleh Amerika Serikat.

"Itu adalah dan merupakan momen penting saya percaya pada aliansi dan untuk keamanan dan stabilitas yang lebih besar tidak hanya di Eropa dan Amerika Serikat tetapi juga dunia," katanya Biden tentang masuknya kedua negara itu ke NATO.

Senat AS mendukung ekspansi tersebut dengan skor 95-1 pekan lalu, sebuah tampilan langka persatuan bipartisan di Washington yang terpecah belah. Baik Senator Demokrat dan Republik sangat menyetujui keanggotaan untuk kedua negara Nordik, menggambarkan mereka sebagai sekutu penting yang militer modernnya telah bekerja sama dengan NATO.

Pemungutan suara itu sangat kontras dengan beberapa retorika di Washington selama pemerintahan Presiden Don-

ald Trump, yang mengejar kebijakan luar negeri "America First" dan mengkritik sekutu NATO yang gagal mencapai target pengeluaran pertahanan.

Swedia dan Finlandia mengajukan keanggotaan NATO sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari. Moskow telah berulang kali memperingatkan kedua negara agar tidak bergabung dengan aliansi tersebut.

Putin mendapatkan "persis apa yang tidak dia inginkan," dengan masuknya kedua negara ke dalam aliansi, kata Biden.

Seluruh 30 sekutu NATO menandatangani protokol akses untuk Swedia dan Finlandia bulan lalu, yang memungkinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi bersenjata nuklir setelah semua negara anggota meratifikasi keputusan tersebut.

Akses tersebut harus diratifikasi oleh parlemen dari 30 anggota NATO sebelum Finlandia dan Swedia dapat dilindungi oleh Pasal Lima, klausul pertahanan yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu sekutu adalah serangan terhadap semua.

Ratifikasi bisa memakan waktu hingga satu tahun, meskipun akses telah disetujui oleh beberapa negara termasuk Kanada, Jerman dan Italia. ● gul